

ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

BUKAN FUNGSIONYA : Sejumlah motor tampak parkir di atas trotoar kawasan Dalung, kemarin. Padahal trotoar yang masuk proyek peremajaan ini belum selesai dikerjakan.

Belum Rampung, Jadi Tempat Parkir

MANGUPURA - Upaya Pemkab Badung melakukan peremajaan trotoar di sepanjang Jalan Raya Dalung, Kuta Utara bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, proyek trotoar yang belum sepenuhnya rampung itu sudah digunakan parkir sembarangan. Tidak hanya kendaraan roda dua, mobil

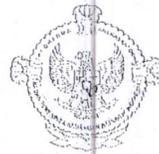
juga kerap nangkring di atas trotoar. Parahnya lagi, para pelanggar ini dengan cuek parkir seperti tidak malu jika trotoar belum selesai digarap.

"Sebenarnya parkir di atas trotoar ini sangat merugikan. Apalagi trotoar yang masih setengah jadi, kekuatannya belum sempurna," ujar Kabid Jalan dan Jem-

batan Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Badung, Sang Oka Permana kemarin (26/9). Oka melanjutkan, trotoar menjadi sangat rentan jebol jika terus-terusan menahan beban berat. Sebab, fungsi trotoar dibangun untuk pejalan kaki. Bukan parkir kendaraan. Apalagi kendaraan roda empat.

Oka mengaku tidak mempunyai wewenang menindak orang yang parkir di atas trotoar. Oka berharap masyarakat bisa mengerti dan sadar ikut menjaga trotoar. "Trotoar dibangun pakai uang rakyat juga, jadi kamiimbau agar sama-sama menjaga fasilitas publik" imbuhnya. (san/han)

Edisi : Minggu, 27 September 2015
Hal. : 24



Eks Tiara Grosir Jadi Sarang Mesum

Dewan Tuding Pemkot Tak Punya Konsep

DENPASAR - Nasib gedung bekas Tiara Grosir, Jalan Cokroaminoto Denpasar, masih tetap saja gabeng. Pemkot Denpasar sampai saat ini belum mempunyai rencana jelas pemanfaatan gedung tersebut. Celakanya, di tengah ketidakpastian itu, gedung tersebut saat ini menjadi tempat mesum. Informasi yang didapat koran ini dari warga setempat, aksi mesum itu terjadi terjadi pada malam hari.

"Gampang kok, pas malam minggu ke sini pasti ada saja pasangan yang masuk ke dalam. Biasanya masuk lewat samping (Jalan Maruti)," ujar salah seorang warga yang tidak mau menyebutkan namanya. Gedung eks Tiara Grosir menjadi sarang mesum memang cukup masuk akal. Pasalnya, gedung tersebut tidak dilengkapi dengan penerangan lampu yang memadai. Disamping itu, tidak ada pengawasan khusus terhadap siapa yang masuk ke dalamnya. Sehingga siapa pun bisa masuk ke dalam gedung dan melakukan perbuatan apa saja.

Terkait hal ini, Kabag Humas Pemkot Denpasar IB Rahoela mengaku kaget. Tapi, pejabat asal Buleleng ini menyadari jika lahan tersebut sangat



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

TAK JELAS : Salah satu sudut ruangan bekas Tiara Grosir.

berpotensi dijadikan tempat melakukan pergaulan bebas. Sebab, gedung cukup terbuka tanpa pengamanan. "Sudah kami sadari, namanya gedung kosong, bisa saja dimanfaatkan orang yang bertanggung jawab. Sebelum dimanfaatkan, kami akan meminta ditindaklanjuti PD Pasar," kata Rahoela.

Ditanya peruntukkan gedung, Rahoela mengatakan rencana Pemkot Denpasar membuat pusat usaha kecil menengah (UKM). Karena itu lahan

dan gedung diserahkan kepada PD Pasar Kota Denpasar. Rencananya PD Pasar akan menggandeng pihak ketiga untuk mengelola gedung tersebut. Namun saat ini hal itu belum bisa direalisasikan. Menurut Rahoela, banyak investor yang tertarik mengelola, tapi untuk mengajak pedagang UKM yang dinilai cukup sulit. "Untuk merangkul UKM agak susah karena UKM kan untungnya tidak besar, lebih seperti *ngayah*. Tapi, tetap akan dijadikan pu-

Edisi : Minggu, 27 September 2015

Hal. : 24



sat memasarkan UKM," terang Rahoela.

Di sisi lain, mangkraknya gedung Tiara Grosir hingga menjadi tempat mesum dinilai murni sebagai kesalahan Pemkot Denpasar. Pemkot dinilai tidak konsisten dan tidak mempunyai konsep yang jelas. "Kalau saja Pemkot mempunyai konsep dari awal, maka gedung itu sudah terpakai. Itu gedung berada di lahan strategis dan berekomi tinggi. Tapi, karena tidak ada konsep jadinya seperti ini," sentil anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra.

Katanya, sebagai anggota dewan sangat merasa kecewa. Apalagi sampai jadi tempat mesum. "Pemkot harus bertanggungjawab. Segera pasang lampu dan tempatkan tenaga keamanan," tegas politisi asal Puri Gerenceng ini.

Terkait pemanfaatan gedung yang melibatkan PD Pasar, Susruta menilai pemerintah hanya memperpanjang masalah. Menurutnya, seharusnya Pemkot langsung mengadakan lelang terbuka tanpa perlu menunjuk PD Pasar. Selama ini kinerja PD Pasar dinilai tidak memuaskan. "Langsung saja adakan lelang, cari pemenangnya. Untuk apa melibatkan PD Pasar kalau ujung-ujungnya melibatkan pihak ketiga. Hanya memperpanjang masalah dan membuat potensi kebocoran besar saja," sodok Susruta. (san/han)

Edisi : Minggu, 27 September 2015

Hal. : 24

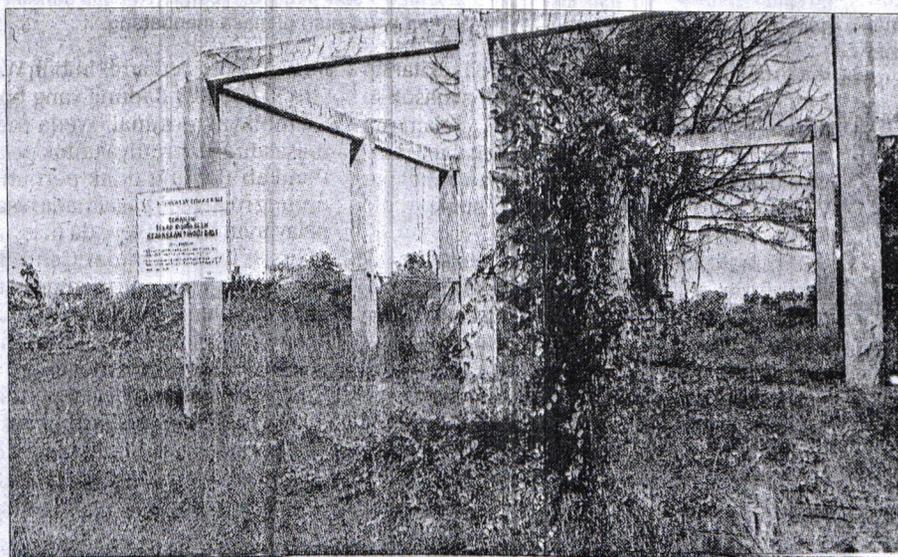


Kejati Sita Lahan di Bypass Mantra

GIANYAR- Lahan yang diduga sebagai objek korupsi lahan Bypass IB Mantra ternyata sudah disita oleh Kejati Bali. Hal itu terlihat dari papan penyitaan yang telah dipasang di lahan yang berada di wilayah Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, tersebut.

Pantauan di lokasi siang kemarin (26/9) menunjukkan, aset yang berupa lahan seluas 5 are, itu sepertinya sudah sempat bakal dibangun. Pasalnya saat ini lahan kering yang berada di sisi selatan Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, itu sudah berdiri tiang beton, lengkap dengan ring beton di bagian atasnya, dan dasar bangunan di bagian bawahnya ■

► *Baca Kejati... Hal 31*



WIDIADNYANA/RADAR BALI

SUDAH DISITA: Lahan Bypass IB Mantra di Desa Keramas, Blahbatuh, ini ternyata sudah disita sejak 2011.

Edisi : Minggu, 27 September 2015

Hal : 21



Lokasi Dekat Objek Wisata

■ KEJATI...

Sambungan dari hal 21

Namun, kini bangunan yang belum jelas bentuknya, itu sudah dipenuhi tumbuhan liar. Sebagai pembeda dengan lahan di sekitarnya, di bagian depan bangunan tersebut terpasang sebuah plang warna putih milik Kejaksaan Tinggi Bali. Dalam plang berukuran 1 m x 75 cm, itu tertera tulisan yang menyebutkan tanah tersebut telah disita Kejati Bali. Penyitaan ini didasarkan pada surat perintah penyitaan Kejati Bali Nomor Print 354/P.1/Ed/06/2011, tertanggal 24 Juni 2011. Penyitaan juga didasarkan pada surat penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Gianyar

dengan Nomor 177/Phy/Pen. Pid/2014/PN.Gir tertanggal 15 September 2014.

Beberapa warga yang ditemui di lokasi lahan ini pun mengaku tidak mengetahui pasti kapan penyitaan lahan itu dilakukan. Mereka beralasan, selama ini mereka tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut.

"Saya kurang tahu pasti. Karena selama ini saya tidak tinggal di sini, saya hanya kerja saja dekat sini," ujar salah seorang warga yang terlihat duduk di samping lahan tersebut.

Disinggung mengenai kapan papan penyitaan tersebut dipasang, pria yang enggan menyampaikannya, ini juga memilih irit bicara. Hanya sekadar menjawab, jika papan tersebut sudah

dipasang sejak lama.

"Sudah lama itu. Sudah ya, saya tidak mau ikut-ikutan," kelitnya sambil berlalu. Setelah mengetahui lahan tersebut tengah diusut kejaksaan.

Sementara itu, melihat posisi lahan tersebut, memang sangat strategis. Pasalnya selain berada di pinggir Jalan Bypass Ida Bagus Mantra yang dikenal memiliki nilai selangit. Lokasi lahan tersebut juga dekat dengan beberapa objek wisata seperti Pantai Keramas. Bahkan, di sekitar lahan tersebut juga berdiri beberapa unit hotel, restoran, villa hingga penginapan.

Seperti berita sebelumnya, setelah lama tak terdengar kasus dugaan penggelapan lahan aset

negara di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, wilayah Desa Keramas, kembali menyeruak. Bahkan, Kejati Bali yang mengusut kasus, ini sudah melaksanakan gelar perkara dengan melibatkan tiga saksi ahli. Saksi yang menilai pihak BPN (Badan Pertanahan Negara) mestinya ikut bertanggung jawab.

Selain itu, jika sebelumnya hanya ada satu tersangka yakni Wayan Bawa sebagai penjual tanah negara. Kini, sudah ada tiga tersangka lainnya yakni I Gede Wayan Bisma yang mantan kepala Desa Keramas. Kemudian I Wayan Sudiasa dan I Made Surma, dua mantan kepala Dusun Banjar Palak, Desa Keramas tapi menjabat pada periode berbeda. (wid/yes)

Edisi : Minggu, 27 September 2015

Hal : 31



Pastika: Pungli Sama Dengan Bunuh Diri

BANGLI - Kasus pungutan liar (pungli) tiket masuk wisata Kintamani mendapat perhatian dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Dirinya menyebutkan jika kasus pungli ini tidak segera disikapi dengan serius maka akan berdampak buruk bagi pariwisata Bali. Dirinya menyebutkan kasus pungli yang terjadi di Kintamani sama saja dengan bunuh diri.

Usai bertatap muka dengan warga di Desa Susut Kaja ■

► *Baca Pastika... Hal 31*

Pikirkan Sistem Tiket Online

■ PASTIKA...

Sambungan dari hal 21

Kecamatan Susut, kemarin (26/9) Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan persoalan pungli kerap kali dijumpai di dunia pariwisata. Dengan adanya kejadian ini, dampak yang ditimbulkan adalah kunjungan wisatawan yang akan menurun. Jika hal tersebut terjadi, korbannya tidak lain adalah masyarakat Bali sendiri. "Pungli sama saja bunuh diri, kalau citra negatif ini terus ada maka wisatawan juga enggan datang. Secara otomatis, masyarakat yang

mencari makan dari pariwisata pastinya penghasilannya akan terganggu," ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan kepada para instansi terkait untuk mengusut tuntas hingga ke dalam. Pembinaan tersebut dilakukan untuk kemajuan pariwisata Bali, khususnya di Bangli sendiri. Perombakan bisa dilakukan dari mulai manajemen hingga pegawai. "Permasalahan ini harus ditangani secara serius agar nantinya tidak meluas. Dan, harus ada perubahan dari instansi terkait," jelasnya.

Sementara itu, ditemui di tempat yang sama Wakil Ketua

DPRD Bali Nyoman Sugawa Kori berjanji akan mengusut tuntas kasus mafia pungli yang terjadi di Kintamani. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan di kalangan masyarakat Bali yang mengetahui video tersebut sudah meluas. Oleh karenanya pihaknya akan memberlakukan sistem tiket online untuk menghindari kejadian ini terulang. "Kami akan fasilitasi semuanya, jika Pemkab Bangli terbentur anggaran untuk mencapai hal tersebut, kami siap membantu apa pun yang dibutuhkan oleh Pemkab Bangli untuk perbaikan pariwisata," jelasnya. (zul/yes)

Edisi : Minggu, 27 September 2015

Hal : 21 dan 31